

TAK MENUTUP KESEMPATAN MENGABDI 356 PNS Pemda DIY Masuki Masa Pensiun

YOGYA (KR) - Sebanyak 356 PNS di lingkungan Pemda DIY akan segera memasuki masa pensiun. Untuk itu, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menyerahkan SK Pensiun kepada beberapa perwakilan PNS yang akan masuk masa pensiun untuk periode Januari-Juni 2022.

Penyerahan SK Pensiun tersebut dilakukan di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kependidikan, Yogyakarta pada Selasa (21/12). Penyerahan SK Pensiun tersebut hadir pula Wakil Gubernur DIY, Sri Paduka Paku Alam X, Kepala PT Taspen DIY, dan Dirut PT. Bank BPD DIY.

"Saya sampaikan penghargaan dan rasa terima kasih atas pengabdian yang telah diberikan para aparat sipil negara yang mengabdikan selama ini. Terutama selama menjalankan

tugas dan pengabdian, yaitu tugas pemerintahan dan pelayanan di Pemda DIY. Masa pensiun sesungguhnya mendatangkan ketenangan dan kebahagiaan karena beban pekerjaan menjadi jauh berkurang. Dalam usia pensiun, faktor pengalaman adalah sesuatu yang berharga, karena pengalaman merupakan guru terbaik. Pengalaman dapat dijadikan modal untuk memutuskan aktivitas apa yang tepat dan profesi apa yang cocok untuk ditekuni di

masa pensiun,"kata Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X di Gedhong Pracimosono, Kompleks Kependidikan, Selasa (21/12).

Di antara 356 PNS yang memasuki batas usia pensiun, terdapat dua Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, yaitu Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemberdayaan SDM, Aris Riyanta dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi DIY, Rony Primanto Hari.

Mewakili PNS yang akan memasuki masa pensiun, Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemberdayaan SDM, Aris Riyanta menyatakan, para purna karya aparat sipil negara Pemda DIY mengucapkan terima kasih telah diberi kesempatan mengabdikan.

(Ria)-f

DIKUTI PAGUYUBAN LURAH DAN PAMONG Temu Kangen Pejuang Keistimewaan



KR-Istimewa

Ketua Paguyuban Ismaya, Bibit Rustamta (kanan) menunjukkan piagam yang dibagikan dalam temu kangen.

BANTUL (KR) - Paguyuban lurah, pamong desa yang tergabung dalam wadah Ismaya akan menggelar kegiatan bertajuk 'Temu Kangen Pejuang Keistimewaan'. Kegiatan itu rencananya, Kamis (23/12) di Aula Kalurahan Banguntapan. Program tersebut sebagai bentuk

penguatan dan mengawal Keistimewaan Yogyakarta.

"Program temu kangen tersebut bagian terpenting dalam proses mempertahankan dan mengawal Keistimewaan Yogyakarta melalui penguatan kembali keberadaan Ismaya," ujar Ketua Paguyuban Ismaya, Bibit Rustamta di Sanggar

Budaya Grahatama Gang Pancawala Ngentak Bangunjiwo Kasihan, Selasa (21/12).

Bibit menjelaskan, lurah dan pamong yang dulu turut memperjuangkan Keistimewaan Yogyakarta sebagian sudah purnabakti. Meski begitu, mereka membutuhkan tempat berkarya sebagai wadah mengaktualisasikan diri dalam rangka berperan aktif dalam dinamika kehidupan masyarakat.

"Lewat Ismaya sebagai jembatan komunikasi dan penyampai aspirasi masyarakat Yogyakarta, punya komitmen terus berkiprah dan berkontribusi sekaligus jadi penyeimbang dalam kehidupan bermasyarakat di DIY lewat jejaring yang tersebar hingga desa yang jumlahnya 382 kalurahan di DIY," ujarnya. (Roy)-f

Vaksin

Umumnya anak-anak sudah tahu karena biasanya sudah ada program imunisasi rutin di sekolah," ujar Cissy seraya menambahkan, anak jangan ditakut-takuti, melainkan harus diedukasi terkait fungsi vaksinasi.

"Orangtua kalau perlu membawa

catatan imunisasi yang sudah ada supaya bisa ditulis di buku imunisasi apa saja yang sudah diperoleh anak," pesan Cissy.

Soal efek samping vaksinasi atau Kejadian Ikutan Pascaimunisasi (KIPI), Cissy menyampaikan, umumnya ge-

jalanya kecil saja. "Ada dua KIPI, yaitu lokal dan umum. Lokal umumnya sakit bengkak di tempat suntikan. Sedangkan umum antara lain rasa lelah, anak kurang aktif, rasa dingin, atau mual. Namun gejala ini bisa muncul bisa tidak," ujarnya.

(San)-f

Sultan HB X

Adapun penghargaan itu diserahkan langsung Menteri PANRB Tjahjo Kumolo yang didampingi Wakil Ketua Ombudsman RI Bobby Hamzar Rafinus dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron. Wakil Presiden RI, KH Ma'ruf Amin hadir secara daring untuk memberikan arahan pada para penerima predikat.

Selain Sri Sultan Hamengku Buwono X yang menerima penghargaan sebagai Pemimpin Perubahan Pembangunan, beberapa unit kerja di DIY juga menerima penghargaan WBBM dan WBK. Unit kerja pelayanan di DIY yang meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WB-BM) adalah Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan DIY. Sedangkan yang meraih WBK meliputi kantor pelayanan pajak daerah DIY di Kulonprogo, kantor pelayanan pajak daerah DIY di Kota Yogyakarta, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIY. Serta Balai Layanan Perpustakaan ada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.

Ketika dimintai tanggapan soal hal itu

Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan DIY, Setyarini Hestu Lestari SKM MKes menyatakan, keberhasilan Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan DIY meraih penghargaan sebagai unit kerja pelayanan dengan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani(WBBM). Tidak lepas dari dukungan pimpinan Pemda DIY, Kadinkes DIY serta seluruh pegawai di Balai Labkes dan Kalibrasi. Mengingat untuk meraih WBBM tidak lepas dari kerja kolektif yang melibatkan banyak pihak. Karena untuk meraih penghargaan itu membutuhkan proses. Pihaknya tidak segan belajar dari berbagai sumber termasuk dari Youtube serta OPD yang pernah meraih WBBM. Tentunya semua itu tidak lepas dari komitmen bersama, untuk mewujudkan WBBM. Oleh karena itu begitu ditunjuk oleh Pemda untuk mewakili DIY pihaknya bertekad untuk terus berjuang dan memberikan karya terbaik.

"Semua keberhasilan yang sudah diraih ini tidak lepas dari dukungan dari Dinas

Kesehatan DIY serta pihak-pihak terkait lainnya. Adapun kunci dalam meraih penghargaan ini adalah komitmen untuk bisa meningkatkan pelayanan kepada pelanggan (masyarakat).

Peningkatan pelayanan disini dilakukan dengan sebaik-baiknya dan sepenuh hati. Jadi tidak sekadar memberikan layanan prima, tapi juga ada dukungan dari manajemen dan SDM,"terang Setyarini

Setyarini mengungkapkan, dengan keberhasilan yang sudah diraih secara tidak langsung menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas layanan. Untuk itu pihaknya tetap bertekad terus meningkatkan upaya pelayanan dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Jadi mencoba memberikan layanan terbaik, sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang beragam.

Perlu diketahui sebanyak 4.042 unit kerja yang berjuang melewati rangkaian proses evaluasi zona integritas pada 2021 ini. Dari ribuan unit kerja tersebut, terdapat 486 unit kerja yang berhasil mendapat predikat WBK. (Ira/Ria)-d

Perempuan

Kedua sebagai momentum bagi pemerintah untuk melakukan penguatan perempuan dalam kebijakan publik.

Mengapa perempuan harus berdaya dan mengambil peran dalam kebijakan publik?

Perempuan, kepemimpinan dan penguatan kebijakan publik merupakan salah satu kunci untuk menghasilkan kebijakan publik yang memiliki perspektif jender. Dalam implementasi SDGs, tujuan ke-5, target ke 9 yaitu mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang kuat dan perundang-undangan yang dapat ditegakkan untuk mempromosikan kesetaraan jender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan di semua tingkatan (www.un.org, 2020), sangat relevan dalam memaknai Hari Ibu saat ini.

Di tengah upaya pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kemen PPPA) untuk mencapai kesetaraan jender dan memberdayakan perempuan, kita perlu menyimak ulang persoalan yang terjadi pada perempuan. Data Komnas Perempuan menunjukkan perempuan masih menghadapi masalah kekerasan seksual, kekerasan siber dan perkawinan anak. Jumlah kasus Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2020 sebanyak 299.911 kasus. Kementerian Kesehatan per November 2021 mencatat, proporsi

Kematian Ibu kurang lebih 305 kematian per 100 ribu kelahiran hidup. Angka ini masih jauh dari target 2024 yaitu 183 kematian per 100 ribu kelahiran hidup. Data BPS Maret 2021 mencatat perempuan masih mengalami kemiskinan yang lebih tinggi dibanding laki-laki yaitu 10,37%. Sementara laki-laki 9,92%. Lebih jauh, perkawinan pertama pada perempuan usia di bawah 19 tahun masih sangat tinggi, yaitu usia 17-18 tahun sebesar 20,74% dan usia kurang dari 16 tahun sebanyak 15,48% (Kemen. PPPA, 2020a).

Dari potret tersebut, kita dapat memahami bahwa masih ada persoalan dari sisi perlindungan terhadap perempuan, kesehatan perempuan, dan kemiskinan yang dialami perempuan. Diskriminasi, kekerasan, praktik berbahaya, pernikahan dini, minimnya akses ekonomi perempuan, serta masih tingginya angka kematian ibu ini dapat diminimalisir. Ketika kebijakan publik dirumuskan secara perspektif jender (*gender perspective in public policy*).

Pada sisi kebijakan publik, idealnya posisi perempuan dalam pengambilan keputusan di bidang politik sangat penting. Karena akan memberi peluang dipertimbangkannya suara, kepentingan, dan kebutuhan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan (Kemen PPPA, 2021). Survei Cakra Wikara Indonesia (CWI), menunjukkan proporsi jumlah PNS

perempuan di 34 kementerian stabil dikisaran 39%. Rekrutmen PNS laki-laki dan perempuan memiliki proporsi yang seimbang, namun terdapat ketimpangan yang signifikan dalam perjalanan karier mereka.

Dari aspek politik dalam pemerintahan tahun 2019, jumlah anggota DPR yang perempuan 20,87%, dibandingkan dengan laki-laki sebanyak 79,13%. Kemampuan menghasilkan kebijakan publik yang perspektif jender ditentukan para pembuat keputusan, proses pembuatan kebijakan, dan kesetaraan jender dalam semua level kepemimpinan. Selain itu juga perlu mengatasi hambatan dari sisi kultur patriarki di lingkungan kerja, peran domestik rumah tangga, stereotip jender. Juga minimnya dukungan lingkungan kerja, motivasi memimpin dan kebijakan yang masih netral.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah perlu meningkatkan kerja sama dengan stakeholders. Seperti perguruan tinggi, NGO, organisasi sosial masyarakat, serta komunitas yang relevan agar mampu mewujudkan penguatan kaum ibu dalam semua peran domestik maupun publik. Sebagai perempuan berdaya yang setara dan saling melengkapi dengan kaum laki-laki.

(Penulis adalah Guru Besar Ilmu Pemerintahan pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)-d

DIANGGARKAN RP 5 MILIAR Program Kota Tanpa Kumuh di Temanggung

TEMANGGUNG (KR) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan dana Rp 5 miliar untuk program kota tanpa kumuh (Kotaku) di lima Desa/Kelurahan di Kabupaten Temanggung. Bupati Temanggung Al Khadzqi mengemukakan, lima desa/kelurahan yang mendapat program Kotaku, yakni Kelurahan Parakan Wetan, Kelurahan Parakan Kauman dan Kelurahan Wali-telon Utara. Selain itu, juga Desa Glapansari dan Desa Nampirejo. "Masing-masing desa/kelurahan tersebut mendapat alokasi dana Rp 1 miliar," kata Bupati Al Khadzqi pada peresmian program Kotaku, Selasa (21/12).

Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah (PPPW) II

Jateng Anggoro Putro mengatakan, program Kotaku sebagai kegiatan bantuan pemerintah untuk masyarakat (BPM). "Program Kotaku harus berdampak pada pengurangan luasan kawasan kumuh," kata Anggoro Putro.

Melalui program ini juga diharapkan, terjadi kolaborasi pada penanganan kawasan kumuh dan kegiatan infrastruktur di bangunan berkualitas baik sesuai dengan standar PU. Berkurangnya luasan kumuh dan serapan terhadap tenaga kerja, harapannya dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat," ujarnya.

Kegiatan program Kotaku meliputi pembangunan jalan, drainase, tempat penampungan pengolahan dan pemanfaatan sampah serta penanganan sanitasi. (Osy)-f

Keteguhan

parut tradisional merupakan kaum ibu-ibu. Selama ini yang disaksikannya berjualan alat parut di pasar-pasar tradisional adalah kaum laki-laki.

"Kalau tidak ada penyerahan bantuan pembaca KR hari ini, jujur saya tidak tahu kalau pengrajin parut tradisional adalah ibu-ibu. Ini luar biasa, manajemen KR bisa menyalurkan bantuan kepada pihak yang memang sangat membutuhkan. Bantuannya betul-betul tepat sasaran," jelas Fajar yang biasa disapa Mas Wabup.

Lebih lanjut Mas Wabup Fajar Gegana memuji keteguhan hati dan semangat kaum ibu-ibu Pedukuhan Dukuh Kalurahan Karang-sari yang hingga saat ini masih terus menggelu-

ti pekerja sebagai pengrajin parut. Apalagi dari sisi ekonomi pekerjaan tersebut tidak menjanjikan keuntungan yang besar. Tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehari-hari.

Sehingga dengan adanya bantuan pembaca KR ungkap Fajar, hal itu bisa meringankan beban para pengrajin parut di tengah kondisi memprihatinkan pandemi Covid-19. "Saya atas nama pribadi dan Pemkab Kulonprogo mengucapkan terima kasih sekaligus mengapresiasi positif kepedulian manajemen KR terhadap warga kami yang hingga saat ini masih menekuni pekerjaan yang notabene memproduksi alat tradisional di tengah pesatnya kemajuan teknologi. (Rul)-d

Presiden

Panitia juga telah membentuk Satgas Covid-19 khusus Muktamar ke-34 NU di bawah koordinasi dr Ahmad Fariz Malvi Zamzam Zein. Pembukaan Muktamar ke-34 NU akan disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube dan ditampilkan di beberapa layar yang ditempatkan di titik-titik tertentu lokasi muktamar.

Peserta dan Nahdliyin di luar Pondok Pesantren Darussa'adah juga dapat mengikuti momen tersebut secara langsung di tempat masing-masing tanpa perlu hadir memenuhi arena pembukaan.

Setelah pembukaan, peserta akan melanjutkan kegiatan tersebut dengan mengikuti sidang tata tertib dan laporan pertanggungjawaban di Gedung Serbaguna (GSG) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Rabu (22/12) petang hingga malam.

Kegiatan dilanjutkan esoknya, Kamis (23/12), dengan agenda sidang komisi. Sidang ini dilaksanakan lebih singkat dari muktamar-muktamar se-

belumnya mengingat adanya keharusan menjaga prokes. Sidang komisi ini dijadwalkan mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB. (Ant)-f



Prakiraan Cuaca Rabu, 22 Desember 2021						
Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Dini Hari	Suhu C	Kelembaban
Bantul	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	23-31	70-95
Sleman	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	23-29	70-95
Wates	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	24-30	70-95
Wonosari	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	23-30	70-95
Yogyakarta	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	23-31	70-95

Hanif Al Fatta M.Kom
Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas AMIKOM Yogyakarta
BEBERAPA hari yang lalu saya melakukan

Akhir Tahun dan Kampung Halaman

perjalanan antar kota dari Semarang ke Yogyakarta. Hari Minggu sore, dari arah kota Yogyakarta ke luar Yogyakarta, antrian panjang kendaraan terjadi di hampir setiap lampu merah dan gerbang tol. Saya jadi ingat ini Desember, akhir tahun dan banyak liburanya. Apalagi pengamatan terkait covid sudah sudah dilonggarkan. Antrian panjang kendaraan itu selalu mengingatkan saya pada antrian yang terjadi saat mudik lebaran dan natal. Mungkin saja ini adalah pergerakan manusia terbesar yang terjadi di negeri ini dalam 1 tahun.

Saya kemudian berpikir, apa yang mendorong saya dan sekian banyak orang harus melewati kemacetan, dan jalan panjang untuk menuju satu titik yaitu pulang, ke kampung halaman ke tempat dimana kita dilahirkan. Mengapa setiap kali saya sampai dan tinggal untuk sementara di tempat saya dilahirkan ada perasaan bahagia dan mendorong untuk terus menerus mengulang sesering mungkin. Insting untuk kembali ke tempat kita dilahirkan ternyata ada dijumpai pada fenomena alam. Migrasi ikan salmon misalnya, ikan salmon yang hidup dilaut dapat menyeberang lautan dan melawan arus sungai sejauh 1000 km untuk kembali ke tempat ikan itu menetap dulu. Tentunya banyak rintangan yang menanti ikan Salmon ini, dari burung pemakan ikan, beruang, sampai harus memanjat air terjun dan terus melawan arus. Tujuan migrasi ini jelas karena mereka akan berkembang biak di tempat tersebut kemudian mati. Nah, kita punya tujuan yang sangat berbeda ketika kembali ke tempat kita dilahirkan.

Saya secara pribadi, sangat bahagia untuk pulang karena bertemu dengan orangtua. Dikelilingi saudara-saudara dan orang-orang yang familier adalah bentuk hadiah yang sulit didapat di daerah kita bermita-grasi. Keakraban tempat dan nostalgia masa lalu adalah hal yang tidak bisa dibeli dan diimitasi ditempat lain.

Dalam bahasa yang lebih luas, tempat kelahiran bisa mendefinisikan identitas diri kita seterusnya. Saya lahir di Jawa, sehingga orang akan mengasosiasikan saya dengan budaya yang dimiliki orang Jawa. Yang lahir di Batak dan Madura juga akan mendapatkan warisan yang sama. Sehingga pulang ke tempat kelahiran bukan masalah rumah atau desa tetapi lebih ke pulang ke budaya dan komunitas yang menjadi identitas kita diluar sana.

Merefresh kembali atau menetapkan kembali siapa kita, dari mana kita berasal, dan mengutuhkannya kembali akar budaya kita ternyata menguatkan manusia, paling tidak saya, untuk kembali hidup di kota atau bahkan negara lain. Pulang tidak hanya sekedar menjadi aktifitas fisik liburan tetapi juga tetirah batin untuk mengenangi akar budaya kita dan bangunan kecintaan kita pada kehidupan. Pada istilah Jawa dikenal istilah "dunung", yang arti harfiahnya adalah asal. Kembali ke tempat kita dilahirkan pada hakikatnya adalah kembali pada dunung, bukan pada tempat fisiknya saja, tetapi kembali pada tempat asal kita diciptakan dan diberikan "tujuan". Dunung adalah sumber energi positif karena ditempatkan itu-lah pertama kali kita mengenali cinta kasih dari orangtua, dari orang-orang terdekat, dan dari ibu pertiwi. Inilah kecintaan yang selalu saya temui ketika saya pulang kampung.

Untuk para pembaca yang merencanakan pulang kampung, selamat menikmati perjalanan. Temukan cinta, temukan "dunung" kita masing-masing, jadikan itu bagian yang membangun jatidiri kita seutuhnya.*

